

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.1, Juni 2022

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 1 Juni 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Paisal, S.H.
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Zakiah, SE, Ak
- Editor/Penyunting** : Dr. Sabara, M. Phil. I
Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Sitti Arafah, S.Ag, M.A
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.i., M.Pd.I
H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag.
Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Darwis, S.Pd.I
Syamsuddin, SM
Sari Damayanti, S.H.
Rismawaty Rustam, SE
Nur Saripati Risca, S.Pd
Burhanuddin
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

EDITORIAL

SAPRILLAH
KESETARAAN GENDER ATAU KESEIMBANGAN GENDER?

Halaman: 1 - 9

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL
MENUJU FEMINISME NUSANTARA :
MENATA ULANG GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Halaman: 10 - 45

MIFTAHUS SURUR
FEMINISME NUSANTARA: MEMBINCANG TIGA PEREMPUAN
“PINGGIRAN”

Halaman: 46 - 62

ABD. KADIR AHMAD
PEREMPUAN SUFI DIBALIK HIJAB HEGEMONI LAKI-LAKI
(DALAM KARYA ULAMA ABAD KE-10/11 M)

Halaman: 63 - 87

SABARA
PEREMPUAN DALAM KEARIFAN LOKAL SUKU KEI

Halaman: 88 - 111

SUBARMAN DAN SOPIAN TAMRIN
MELIHAT FEMINISME PADA SOSOK MANGKAU BESSE KAJUARA

Halaman: 112 - 135

MEGAWATI
PEREMPUAN SEBAGAI AKTOR PENGGERAK: PERJUANGAN
PEREMPUAN KODINGARENG MELAWAN KORPORASI TAMBANG
PASIR LAUT

Halaman: 136 - 161

**BAHRUL AMSAL DAN RUKIANA NOVIANTI PUTRI
EKOFEMINISME ALA MASYARAKAT KAJANG: ILMU DAN AMALNYA**

Halaman: 162 - 188

**SITTI ARAFAH
PEREMPUAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SEBUAH PRAKTIK**

Halaman: 189 - 206

**MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
BERBAGI KUASA: KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI
DALAM RUMAH TANGGA**

Halaman: 207 - 229

**AINUN JAMILAH
CADAR GARIS LUCU: GERAKAN MUSLIMAH ANTI KEKERASAN**

Halaman: 230 - 242

REVIEW BUKU

**MUHAMMAD ALI SAPUTRA
FEMINISME ISLAM: GENEALOGI, TANTANGAN, DAN PROSPEK DI INDONESIA**

Halaman: 243 - 257

ARTIKEL UTAMA**PEREMPUAN SEBAGAI AKTOR PENGGERAK : PERJUANGAN
PEREMPUAN KODINGARENG MELAWAN KORPORASI TAMBANG
PASIR LAUT***Megawati*

Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel.

Toddopuli VII Stp.2, Makassar.

Email: mmegawati0707@gmail.com**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan perempuan dalam gerakan sosial penolakan tambang pasir untuk mempertahankan ruang hidup mereka. Penelitian ini menggali strategi yang digunakan oleh perempuan pejuang Kodingareng dalam menjaga ruang hidup mereka. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan dianalisis dengan teori gerakan sosial. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dan dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan masyarakat Kodingareng. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sifatnya terbuka sehingga wawancara bisa berkembang sedemikian rupa. Penelitian ini menunjukkan, perjuangan masyarakat Kodingareng dalam mempertahankan ruang hidupnya tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga perempuan. Pengalaman-pengalaman pahit yang dialami perempuan Kodingareng menjadikan mereka sebagai perempuan yang kritis. Sayangnya suara-suara perempuan pinggiran yang ada di Kodingareng ini tidak terdengar dan jarang digaungkan. Karena itulah melalui tulisan ini suara-suara bisu dari kelompok pinggiran, dari perempuan nelayan Kodingareng diangkat. Mereka yang selama ini tak terdengar atau sengaja tidak didengar suaranya, ternyata memiliki semangat perlawanan dan bentuk gerakan sendiri. Gerakan yang muncul dari kesadaran untuk merespons eksploitasi dan kolonialisme bentuk baru dari berbagai institusi yang terlibat.

Kata Kunci : Perempuan, gerakan sosial, tambang pasir**PENDAHULUAN**

Gerakan perempuan di masa kolonialisme hingga kini. Dalam Indonesia bukanlah hal yang baru. sejarah tersebut ternyata perempuan Sejarah telah menorehkan banyak kisah tidak tinggal diam, melainkan tentang para pejuang perempuan sejak perempuan juga turut aktif dalam

segala aspek kehidupan ini. Meskipun selama ini sejarah gerakan perempuan samar-samar dan terpinggirkan, tetapi pada akhirnya sejarah pula yang menunjukkan bukti bahwa kiprah manusia tidak hanya dikuasai oleh laki-laki, tetapi juga perempuan. Banyak bukti atau peninggalan sejarah yang menceritakan tentang gerakan perempuan tersebut.

Pada masa kolonialisme di Indonesia tidak sedikit perempuan yang turut aktif dalam melawan penjajah, baik secara pemikiran dan juga terlibat aktif dalam peperangan. Dalam hal peperangan ada beberapa nama tokoh perempuan yang sering kali diperbincangkan kiprahnya. Misalnya dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan, terdapat tokoh Cut Nyak Dien, Laksamana Keumalahayati, Martha Christina Tiahahu dan Emmy Saellan. Cut Nyak Dien perempuan asal Aceh tampil gagah perkasa dalam melawan kolonialisme di Aceh. Cut Nyak Dien membuat takjub banyak perempuan dan para sejarawan. Dengan tekad dan keberanian yang tinggi Cut Nyak Dien memimpin pasukannya

untuk melawan penjajah agar meninggalkan tanah Aceh.

Tidak hanya Cut Nyak Dien perempuan perkasa yang lahir dari tanah Aceh, lahir juga seorang perempuan pejuang yang bernama Malahayati, seorang pemimpin dari 2.000 orang pasukan *inong Balee* (janda-janda pahlawan yang telah mati syahid) yang tampil untuk berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng belanda. Kemudian diletakkan gelar laksamana pada dirinya sebagai hasil dari keberaniannya.

Jika sebelumnya telah dibahas tentang pejuang perempuan di Tanah Aceh kini kita beralih di timur Indonesia. Pada tahun 1800 lahir perempuan di negeri Abubu, nusa laut yang kelak mengangkat senjata untuk melawan Belanda di usianya yang ke 17 tahun. Dialah Martha Christina Tiahahu. Sejak awal pertempuran, perempuan perkasa ini selalu tampil gagah berani mendampingi ayahnya dekan tekad yang kuat dan tidak ada istilah mundur.

Di Sulawesi selatan dikenal pula seorang perempuan yang sejak

masih muda tidak pernah sudi untuk bekerja sama dengan Belanda. Emmy Saelan adalah nama perempuan pejuang itu. Ia menggabungkan diri dengan pasukan Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS). Emmy Saelan dikenal dengan agresinya yang melemparkan granat ke arah Belanda yang hendak menangkapnya sehingga tewaslah delapan penjajah dari Belanda di tangannya. Tindakan heroiknya itu memang harus dibayar mahal dengan nyawanya sendiri.

Menoleh pada sejarah perjuangan perempuan dalam melawan penjajah tentu saja memberi bukti bahwa sepanjang sejarah perempuan tidaklah pasif namun juga turut aktif berkontribusi dalam setiap perjalanan negeri ini. Meskipun sudah tidak lagi terjadi perang fisik di negeri ini, spirit perlawanan perempuan pada masa penjajahan masih dipegang teguh oleh perempuan hingga kini. Perempuan masih ikut berperan aktif melawan setiap ketidakadilan yang terjadi. Spirit itu masih tampak jelas di negeri ini dan nyata kita saksikan pada perjuangan

perempuan Kodingareng melawan konspirasi dan bisnis global yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup mereka. Perempuan Kodingareng tampil perkasa dalam perlawanan masyarakat pulau Kodingareng Lompo melawan para pebisnis tambang pasir yang mengeruk pasir di wilayah perekonomian mereka. mereka menunjukkan bagaimana para perempuan terlibat aktif sebagai aktor perubahan dalam kehidupan sosial.

Konteks perjuangan perempuan Kodingareng melawan tambang pasir merupakan sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan lokal. Dokumentasi gerakan perempuan di Indonesia secara akademis sudah banyak ditemukan, namun sejarah gerakan perempuan lokal hanya tersimpan di perpustakaan dan belum banyak yang terpublikasi secara luas.

Studi gerakan lokal perempuan sangatlah penting untuk menyempurnakan konstruksi teori dan sejarah gerakan perempuan Indonesia. Titik kartika (Kartika, 2018), dalam penelitiannya, "Ragam Identitas Perempuan Bukan Bayang-bayang:

Menguatkan Konstruksi Nasionalisme” menuliskan bahwa publikasi terhadap keterlibatan gerakan perempuan hampir tidak ada atau sangat kurang. Demikian halnya gerakan perlawanan terhadap tambang. Meski berita mengenai kehebatan gerakan sosial melawan korporasi tambang pasir, terpublikasi sangat luas dan menjadi perhatian banyak pihak baik tingkat lokal, dan nasional, tetapi dokumentasi tentang keterlibatan perempuan tersimpan dalam tutur di antara perempuan. Menurutnya ada fenomena tersembunyi, ada suara bisu pada isu gerakan anti tambang yang perlu dibuka sejarahnya.

Ketersediaan catatan tutur dari kontribusi kelompok perempuan atas keberhasilan aksi dan pemikiran mengakhiri aktivitas tambang. Catatan tutur itulah yang perlu disuarakan dan didokumentasikan dalam bentuk tulis.

Dalam aksi menolak penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan, tuntutan perempuan Kodingareng sangatlah tegas, yaitu semua gerakan operasi penambangan harus dihentikan, pemerintah harus mencabut izin penambangan dari

wilayah tangkap ikan para nelayan. Semua itu adalah cerita-cerita kecil dari perjuangan perempuan. Gerakan yang dilakukan oleh para perempuan di wilayah tambang pasir Kodingareng adalah sebuah gerakan feminis. Sebagaimana pengertian feminisme yang mengacu pada gerakan yang menggabungkan doktrin persamaan hak bagi perempuan dengan sebuah ideologi transformasi sosial. Paduan dua hal ini bertujuan menciptakan dunia bagi perempuan melampaui persamaan sosial dalam arti sederhana. (You, 2021)

Mereka menyadari akan rapuhnya gerakan mereka yang kapan saja bisa mendapatkan tekanan dari konspirasi para pihak yang terlibat dalam penambangan. Mereka lantas melakukan konsolidasi, menumpuk kekuatan, mengikuti informasi, mempelajari setiap regulasi terkait dengan penambangan dan menggalang kekuatan dari setiap NGO dan organisasi-organisasi yang pro terhadap perjuangan mereka. Pada akhirnya mereka berhasil membentuk sebuah organisasi Rakyat (OR).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-Deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2007) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dengan peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen. Setelah itu mereduksi data, memaparkan data dan simpulan melalui pelukisan dan verifikasi. (Endraswara, 2006)

PEMBAHASAN

Pembangunan sering kali menjadikan masyarakat bawah tersingkir dari mata pencaharian mereka. Masyarakat dilupakan dalam perancangan kebijakan infrastruktur yang sering kali lebih berpihak kepada kepentingan bisnis sehingga melupakan dampak yang terjadi pada masyarakat setempat. Ada begitu banyak proyek-

proyek pembangunan menysar lokasi yang sudah di huni oleh masyarakat. Pemerintah bisa dikatakan gagal melindungi kepentingan masyarakat yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup mereka pada beberapa lokasi yang digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Inilah yang dirasakan oleh masyarakat Kodingareng, sebuah pulau kecil yang terletak di kecamatan kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penduduk berjumlah 4.526 jiwa, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, telah merasakan getirnya efek pembangunan untuk kehidupan perekonomian mereka. Setelah terjadi reklamasi Makassar New Port (MNP) yang akan dibangun di pesisir kota Makassar, Kelurahan Kaluku Badoa, Tallo dan Buloa, maka nyaris setiap hari pasir di daerah mereka dikeruk.

Makassar New Port adalah salah satu proyek nasional (PSN). Pembangunan Makassar New Port dikerjakan secara bertahap. Tahap 1 di bangun pada tahun 2018. Total investasi sebesar Rp.1,51 triliun. Total

lahan pembangunan adalah 1.428 hektare, dengan nilai investasi sebesar Rp.89,57 Triliun. Proyek Makassar New Port dibagi menjadi tiga tahap. Tahap I proses pembangunannya di bagi lagi per paket. Yaitu paket A, B, C dan D. Tahap I dan II dibangun sejak 2015 hingga 2022 (pelindo, 2019). Rancangan Proyek pembangunan MNP ini di targetkan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia Timur.

Pembangunan MNP ini didukung dengan peraturan nasional yang diatur melalui peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional yang kemudian diubah dengan peraturan presiden nomor 57 tahun 2017.

MNP tentu saja mempunyai dampak buruk bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk masyarakat pulau Kodingareng. Apalagi sejak pasir Perairan Spermonde di keruk. Padahal Perairan Spermonde merupakan wilayah tangkap ratusan nelayan di sekitar kepulauan dan pesisir di kota Makassar. Penambangan pasir dilakukan secara besar-besaran untuk

kepentingan proyek MNP. Penambangan pasir di Blok Spermonde tersebut tentu merupakan alternatif yang paling jitu karena merupakan jalan yang ringkas dan murah untuk mendapatkan pasir penguruk.

Setelah masuknya penambang pasir di sekitar Pulau Kodingareng, hasil tangkapan nelayan pun berkurang drastis. besar kemungkinan tambang pasir di pulau tersebut dikerjakan secara serampangan. Muncul banyak akibat setelah penambangan pasir berlangsung, di antaranya air laut yang menjadi semakin keruh akibat sebaran sedimen hasil kerukan pasir yang berdampak pada terumbu karang sebagai habitat berbagai organisme laut dan terusirnya ikan-ikan ke tengah laut karena suara penyedot pasir. Hal itu sangat merugikan masyarakat Kodingareng yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Mukhtasor (2007) mempertegas kerusakan laut akibat Penambangan pasir laut yang dapat meningkatkan kekeruhan perairan sebagai akibat pengadukan sedimen dasar laut. Peningkatan kekeruhan berpengaruh pada biota laut lainnya

karena menyebabkan kematian telur dan larva karena hilangnya sedimen habitat mereka. Ikan dan udang juga mengalami kesulitan untuk bernapas (Zuleha Ernas, 2018).

Laut merupakan satu-satunya sumber penghidupan warga Kodingareng, namun kini laut tersebut tidak bisa lagi diandalkan sejak beroperasinya kapal Queen of Netherlands milik PT. Royal Boskalis westminster N.V. di Coppong. Coppong sendiri adalah wilayah tangkap nelayan pada Februari-Agustus 2020. Ekosistem laut pun telah rusak dan menjadi penyebab utama menurunnya hasil tangkapan nelayan.

Aktivitas pertambangan yang terjadi di pulau Kodingareng Lompo telah melengkapi penderitaan rakyat. Mereka kehilangan sumber kehidupannya. Proses penambangan yang difasilitasi pemerintah tersebut juga tidak luput dari tindakan kekerasan, *opresi* dan penjarahan. Mereka lupa akan aturan yang menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945), mengatur bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa terdapat prinsip-prinsip dalam mengelola alam dan lingkungan serta hubungannya dengan warga negara, antara lain, yaitu:

1. Sumber daya alam mesti memberi manfaat untuk kemakmuran rakyat;
 2. Demokrasi ekonomi, kebersamaan, keadilan, dan berwawasan ekologis.
- Selanjutnya, aktivitas penambangan pasir, terutama di pesisir dan pantai,

hendaknya didahului dan didasarkan pada izin prinsip dan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Dalam Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2015), mengatur bahwa:

“Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan” (Anggariani et al., 2021). Semua aturan itu sama sekali tidak diperhatikan oleh para korporat tambang pasir laut di laut Spermonde.

KONDISI PEREMPUAN KODINGARENG DI TENGAH TAMBANG PASIR LAUT

Kondisi buruk yang menimpa kehidupan masyarakat pesisir Kodingareng, ternyata menempatkan perempuan dalam posisi yang serba sulit. Kondisi perekonomian semakin sulit sejak beroperasinya kapal-kapal penambang. Hidup yang dulunya

sejahtera kini berubah drastis. Sirkulasi atau perputaran uang di pulau Kodingareng pun macet total akibat tidak adanya pendapatan nelayan sejak terjadinya penambangan pasir di Perairan Spermonde.

Hampir semua perempuan Kodingareng berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari merekalah yang mengatur keberlangsungan hidup dalam rumah tangga masing-masing termasuk dalam hal perekonomian keluarga. Para perempuan Kodingareng menggantungkan kehidupan keluarganya dari penghasilan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini merupakan salah satu fakta bahwa setiap kali terjadi ketimpangan sosial, perempuanlah yang menjadi penerima dampak utamanya.

Di pulau Kodingareng perempuanlah yang mengatur wilayah domestik. Perempuan mempunyai peran mengelola keuangan keluarga. Perempuan diharapkan dapat mengelola penghasilan suaminya yang didapatkan dari hasil tangkap ikan. Penghasilan itu dikelola untuk

mencukupi kebutuhan pokok keluarga, mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder. Sebelum operasi tambang pasir dilakukan di Copong, perempuan-perempuan Kodingareng dapat mengatur setiap kebutuhan itu dengan mudah. Penghasilan para nelayan mampu mencukupi kehidupan mereka bahkan bisa untuk menabung biaya anak-anaknya bersekolah. Mereka bisa hidup sejahtera dengan penghasilan dari suami mereka yang bekerja sebagai nelayan.

Setelah sekian lama mereka hidup sejahtera dengan penghasilan sebagai nelayan, mereka harus merasakan pahitnya hidup setelah wilayah perekonomian mereka di garap oleh para penambang pasir. Pulau kecil yang dulu dipenuhi dengan tawa kini harus berubah menjadi jerit pilu dari warganya akibat kondisi perekonomian yang semakin menghimpit. (Wawancara Rosiana, 2022).

Sebagian besar perempuan pulau Kodingareng mengeluhkan adanya tambang pasir yang mengubah tatanan kehidupan mereka secara drastis.

Ibu Aisyah menuturkan dalam diskusi kami tentang kondisinya kini setelah penambang datang di wilayah tangkap ikan nelayan Kodingareng:

“Semenjak penambang itu datang, kami penduduk Kodingareng sangat diresahkan. Apalagi ibu-ibu di sini, sekarang kewalahan mengatur keuangan. Dulu sebelum Boskalis datang, penghasilan kami sekali melaut biasanya sampai tiga juta rupiah. Sekarang jangankan tiga juta rupiah, dua ratus ribu rupiah saja sudah susah kami dapatkan. Kadang suami kami pulang tanpa penghasilan, kami justru mengalami kerugian bahan bakar. Kalau sudah begini biasanya kami terpaksa harus meminjam uang.” (Wawancara Aisyah, 2018).

Terlihat jelas keresahan yang ditimbulkan oleh penambang pasir di wilayah mereka. Kehadirannya betul-betul mengubah tatanan kehidupan masyarakat Kodingareng. Bukan hanya dalam hal perekonomian tapi hampir seluruh unsur kehidupan mereka.

Aktivitas tambang juga menimbulkan guncangan psikologis terhadap para masyarakat Kodingareng. Trauma hingga kini masih dirasakan

oleh mereka. Masih ada rasa takut yang disimpan, ada rasa khawatir akan tenggelamnya tempat tinggal mereka dikarenakan kerusakan laut yang ditimbulkan oleh penambangan pasir yang dilakukan secara serampangan. Penduduk kini khawatir dengan proses pengikisan daratan akibat hilangnya daya tahan kawasan pesisir terhadap tekanan arus laut.

Masyarakat Kodingareng menyadari bahwa hilangnya sustanaibilitas kawasan hidup akan mengakhiri keberadaan pulau mereka. Yang terpenting adalah nilai pasir laut yang berada di sekeliling mereka tidak bisa semata-mata dilihat dari sisi nilai jualnya di pasar perindustrian tambang, tapi juga harus melihat fungsi pasir laut dalam keseimbangan pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ini nilainya tidak bisa dikonversi ke dalam rupiah, tidak bisa dihitung besaran dan keberlanjutannya. Kegelisahan akan tenggelamnya pulau masyarakat Kodingareng disampaikan dengan lantang oleh Ibu Patimang. Ia menuturkan:

“Dulu kondisi pulau kami tidak seperti ini, dulu pasir terbentang

luas. Bahkan pada saat musim kemarau kami bisa berjalan kaki menuju pulau kecil yang ada di dekat pulau kami, tapi sekarang makin lama pasir di pulau kami semakin surut akibat tergerus air laut, ombak pun semakin tinggi bahkan sudah sampai di beberapa rumah penduduk. Anak-anak tidak lagi punya tempat yang luas untuk bermain bola, sekarang yang tersisa hanyalah kekhawatiran dalam hidup kami.” (Wawancara Patimang, 2022).

Guncangan psikologis juga dirasakan perempuan dikarenakan masyarakat pulau juga mendapatkan intervensi berupa penangkapan hingga perusakan perahu nelayan.

Dalam kehidupan sehari-hari setelah kegiatan penambangan, banyak penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat dikarenakan perekonomian yang kian hari semakin tidak stabil. Ketimpangan itu berupa KDRT, anak-anak putus sekolah, pernikahan dini, konflik antar warga dan beberapa anak yang kemudian harus putus sekolah. Hal itu diceritakan oleh Ibu Sarinah dalam perjumpaan kami:

“Banyak sekali efek dari tambang ini, tetangga saya dulu pernah melempar panci ke suaminya karena pulang dari laut namun tidak membawa hasil. Sementara dia harus menyiapkan makanan untuk keluarganya. Selain itu ada juga anak-anak yang harus putus sekolah karena orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai sekolahnya, karena putus sekolah akhirnya dia harus menikah. Pernikahan yang terjadi di bawah umur alias pernikahan dini” (Wawancara Sarinah, 2022).

Beban perempuan Kodingareng pun semakin bertambah setelah terjadinya tambang pasir di wilayah tangkap ikan nelayan Kodingareng. Jika dulu perempuan Kodingareng hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, kini mereka sudah harus terjun membantu perekonomian keluarga. Dalam hal ini perempuan mempunyai beban ganda.

Sebelum aktivitas tambang pasir dilakukan tidak ditemukan banyak aktivitas berjualan namun kini banyak dijumpai perempuan yang melakukan aktivitas berjualan demi memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Perempuan harus terjun

langsung untuk membantu perekonomian keluarga yang dulu tidak perlu dilakukan karena kebutuhan keluarga sudah bisa terpenuhi dari pendapatan suaminya sebagai nelayan. Selain dari kerusakan lahan pencarian hidup mereka, masyarakat Kodingareng juga harus berada pada situasi konflik antara warga masyarakat dan korporasi yang makin lama makin menekan mereka.

Pada awalnya warga hampir seluruhnya ikut melawan tambang pasir termasuk juga dari unsur pemerintahan yang ada di pulau Kodingareng tersebut. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, konflik pun semakin rumit, bukan hanya konflik antara warga dengan korporasi tambang tapi juga sudah muncul konflik sesama warga Kodingareng. Perempuan pun masuk terlibat dalam tarik ulur kepentingan tambang pasir laut itu.

Konstelasi kepentingan semakin semrawut karena telah masuk pula kepentingan sosial dan politik global. Di mana-mana muncul kecurigaan antar sesama warga, siapa yang menolak dan siapa yang terlibat

dalam konspirasi sulit untuk dibedakan. Perpecahan sosial pun semakin mencolok antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra tambang pasir laut. Kelompok kontra misalnya, menuduh lurah, RT/RW mereka tidak berpihak kepada warga, melainkan ia bekerja untuk kepentingan perusahaan.

GERAKAN PEREMPUAN KODINGARENG

Pulau Kodingareng adalah pulau yang sangat dicintai oleh penduduk. Pulau ini menyisakan banyak kenangan bagi mereka. Pantai adalah simbol yang integratif bagi warga. Mereka memiliki kenangan yang sangat dalam. Tanah ini adalah tanah leluhur mereka yang harus dipertahankan.

Di pulau inilah mereka memulai kehidupan mereka. Kecintaan mereka kepada pulau bukan hanya karena pulau itu memberi hidup dan kehidupan. Masyarakat juga melihat pantai sebagai pemberi semangat, kedamaian hidup dan kenangan-kenangan bagi keluarga yang jauh di perantauan.

Tradisi Pesta Rakyat menjelang bulan puasa, yang dinamai penduduk

Kodingareng minggu ceria, dilakukan setiap tahun. Pesta rakyat itu tentu saja akan sirna apabila pulau kecintaan mereka tenggelam akibat dari penambangan pasir laut di sekitar pulau Kodingareng. Pada perayaan itu masyarakat berkumpul bersama untuk menikmati hasil tangkapan ikan mereka yang diiringi dengan tawa bahagia orang tua, remaja dan anak-anak pulau tersebut. Di pesta rakyat inilah ikatan sosial terbentuk.

Belum lagi pada saat bulan puasa, di sinilah ruang publik terbuka untuk perempuan membantu perekonomian keluarga. Pada saat bulan puasa dan menjelang lebaran ramailah para perempuan Kodingareng untuk berkeliling menawarkan kuliner buatan mereka untuk berbuka puasa.

Hal itu juga dilakukan para pedagang pakaian berkeliling menawarkan macam-macam jualan mereka untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Selain dari itu masyarakat pulau Kodingareng juga masih memiliki tradisi “Mabbaca-baca” pada saat menjelang Idul Fitri sebagai ungkapan rasa syukur atas kembalinya

keluarga mereka yang merantau. Kecintaan terhadap tradisi yang ada itu pula yang menjadi alasan masyarakat Kodongareng bergerak melawan korporasi tambang yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi semata. Gerakan perempuan selama ini banyak dijumpai hanya dari segi emansipasi, seperti yang disuarakan oleh R.A Kartini.

Emansipasi menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan, sama seperti perjuangan perempuan Eropa pada umumnya. Hampir semua gerakan feminisme yang diperjuangkan oleh aktivis perempuan di Indonesia berkiblat pada gerakan perempuan di Eropa. Menjadikan Eropa sebagai kiblat gerakan perempuan tentu tidak mengherankan sebab Indonesia pernah terjajah cukup lama oleh bangsa Eropa yang tidak hanya menjajah secara fisik tapi juga mengobrok-abrik tatanan budaya dan pengetahuan bangsa Indonesia.

Hal itu diperjelas oleh Spivak (1993) dengan penuh keyakinan: 'kelas bawah tidak dapat berbicara'. Dia

menyatakan bahwa perempuan miskin tidak memiliki bahasa konseptual yang mereka gunakan untuk berbicara dan tidak ada telinga laki-laki penjajah dan pribumi yang mau mendengarkan. Tidak ada posisi subjek di dalam diskursus kolonialisme yang memungkinkan mereka bicara untuk diri mereka sendiri (Barker, 2016)

Dalam pandangan Spivak bisa dilihat bahwa pada masa kolonialisme, perempuan miskin tidak punya kesempatan untuk berbicara sehingga diskursus gerakan feminisme tidak mewakili suara-suara mereka. Berbeda dengan Kartini yang hidup di kelas atas. Telinga para penjajah dan pribumi terbuka lebar untuk mendengar suaranya. Model emansipasi yang disuarakan Kartini adalah *role model* dari gerakan feminisme yang disuarakan oleh perempuan Eropa.

Sementara dalam jurnal yang ditulis oleh Muhadjir "Gerakan Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa" menegaskan bahwa tidak seluruhnya keliru jika ada orang yang berpendapat bahwa konsep kesetaraan gender yang disuarakan kaum feminis

Barat lebih merupakan respons dari masalah perempuan di masyarakat mereka. Sementara ketimpangan gender yang dialami perempuan Barat tidak sepenuhnya sama dengan pengalaman perempuan Indonesia. Di banyak daerah di Indonesia perempuan mempunyai kesempatan yang luas untuk mengaktualisasikan potensinya di ranah publik. Perempuan Jawa sejak dulu bebas bekerja di sawah, *bakulan* di pasar, atau sekolah. Segregasi laki-laki dan perempuan seperti yang dialami Kartini adalah fenomena bangsawan Jawa, bukan perempuan *wong cilik* Jawa (Muhadjir Darwin, 2004).

Muhadjir melihat bahwa rata-rata tulisan tentang feminisme yang disuarakan kaum berpendidikan merujuk pada teori emansipasi yang diperjuangkan oleh Kartini. Seperti yang tertera dalam jurnal (Amar, 2017):

Munculnya gender di Indonesia berawal dari adanya tradisi budaya yang kuat yang mengikat kaum perempuan pada waktu itu. Perempuan dianggap sebagai the second sex yang hanya bertugas membantu suami saja. Hal tersebut yang mendorong adanya pemberontakan oleh kaum perempuan itu sendiri terhadap

budaya mereka, dengan munculnya RA Kartini sebagai pelopor pemberontakan tersebut. Dengan memajukan perempuan dalam bidang pendidikan. Akhirnya muncullah berbagai pergerakan kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti, sosial, politik, budaya pertahanan dan sebagainya.

Menurut Muhadjir kondisi perempuan yang digambarkan oleh Kartini itu adalah gambaran perempuan bangsawan di masanya, karenanya tidak dapat menjadi representasi bagi kebanyakan perempuan Indonesia. Emansipasi yang ditampilkan tersebut lebih pas pada konteks persoalan gender yang dialami oleh perempuan Eropa.

Tidak banyak ditemukan gerakan perempuan yang berjuang pada level perekonomian, akan merugikan perempuan sendiri. Sebab jika terjadi terus menerus akan mengakibatkan eksploitasi ekonomi yang bisa berlangsung tanpa kendali. Padahal dalam banyak kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan perempuan. Menurut Blackburn, dalam

buku Kartika: “Perempuan Lokal vs Tambang Pasir Besi Global” isu eksploitasi ekonomi perempuan lambat diadvokasi dan terabaikan sebab isu itu berbeda dari isu *mainstream* gerakan perempuan. Perlawanan perempuan dari kawasan eksploitasi itu selalu ada dan tumbuh. Sebagian dari perlawanan perempuan di tingkat lokal berbeda dari kerangka dan narasi besar gerakan perempuan. Karena “terlepas” dari gerakan perempuan *mainstream*, suara dan identitas gerakan mereka belum banyak terungkap. Kenyataan ini bisa menjadi kerugian besar dari gerakan perempuan, sebab gambaran perjuangan perempuan dari luar *mainstream* akan tetap tersembunyi. (Kartika, 2014)

Perlawanan perempuan yang ditampilkan oleh perempuan Kodingareng merupakan sebuah gerakan sosial. Spencer (1982) menyatakan bahwa yang dimaksud *social movement* adalah upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru. Ciri utama dari pandangan Spencer adalah adanya upaya kolektif (bersama) dan

upaya tersebut diarahkan untuk terjadinya perubahan suatu tatanan yang lebih baik lagi dari tatanan yang ada (Sukmana, 2016).

Tarrow (1998) mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan-tantangan kolektif yang dirasakan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang. Tarrow menempatkan gerakan sosial di dalam kategori yang lebih umum tentang politik perlawanan (*contentious politik*). Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan (*Cyclus of contention*) dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh.

Kekuatan tersebut menggalang kekuatan untuk melawan para elite, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Perlawanan seperti ini biasanya muncul ketika kesempatan dan hambatan politik tengah berubah dan menciptakan dorongan bagi aktor-aktor sosial yang kurang memiliki

sumber daya pada dirinya sendiri. Ketika perlawanan di dukung gerakan sosial yang kuat dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan dan hasilnya adalah gerakan sosial (Suharko, 2011)

Definisi gerakan sosial dari Spencer dan Tarrow dapat menjadi rujukan dari gerakan masyarakat Kodingareng yang telah bergerak secara kolektif untuk melawan penambang pasir di daerah Copong, wilayah tangkap ikan mereka. Para perempuan menggalang kekuatan untuk melawan para elit dan pemegang otoritas dalam pertambangan pasir di wilayah mereka.

Menyadari soal tambang pasir yang banyak merugikan mereka, perempuan Kodingareng pun melakukan perlawanan terhadap para penambang pasir laut yang mengganggu ruang hidup mereka. Salah Satu bentuk perlawanan yang mereka lakukan adalah unjuk rasa yang telah dilakukan berkali-kali selama

penambang pasir masih berada di Blok Spermonde. Perlawanan yang mereka lakukan tidaklah mudah, para perempuan pejuang mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan wilayah tangkap ikan nelayan tersebut, mereka kerap mengalami intimidasi berupa penangkapan para nelayan setelah melakukan demonstrasi di beberapa titik. Mereka juga mendapat ancaman-ancaman kekerasan, bahkan hingga ancaman pembunuhan. (wawancara Darisa, 2022)

Pada awal datangnya penambang di Copong, tepatnya 12 Februari 2020. para nelayan mulai gelisah karena menemukan air laut yang dulu jernih tiba-tiba menjadi keruh setelah mereka melihat kapal besar yang sedang beroperasi melakukan penambangan pasir tepat di wilayah tangkap ikan mereka. Di Hari-hari berikutnya kekeruhan air laut bertambah parah akhirnya para nelayan mulai berkumpul dan mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi. Muncul keinginan dari mereka untuk mengusir kapal tersebut namun mereka juga ragu sebab mereka tidak mengerti tentang

aturan pertambangan yang kini sedang berada ditengah-tengah mereka.

Hingga akhirnya mereka bertemu dengan salah satu putra pulau yang merantau ke kota Makassar. Pria itu bernama Sardi. Sardi pulang ke pulau tersebut untuk menyelamatkan pulau tempat ia lahir dan tumbuh sebelum akhirnya ia menetap di kota Makassar.

Para warga menyambut hangat kedatangan Sardi dan berbangga sebab ada putra dari pulau mereka yang datang untuk membantu masyarakat mempertahankan wilayahnya dari penambang. Sardi inilah yang kemudian membakar semangat warga untuk bergerak melawan para korporasi tambang tersebut hingga akhirnya tergalang kekuatan dari masyarakat untuk melakukan protes terhadap penambang yang mengeruk pasir tepat di wilayah mereka. Dengan Sardi masyarakat pulau Kodingareng melakukan protes tepat di titik penambangan pasir laut dilakukan.

Aksi protes itu dilakukan oleh para nelayan dan juga para perempuan Kodingareng yang sebelumnya tidak

pernah ikut melaut dengan suami mereka. Di situlah protes besar-besaran pertama kali dimulai oleh penduduk Kodingareng.

Kebahagiaan masyarakat Kodingareng dengan kehadiran Sardi, ternyata tidak berlangsung lama. Baru saja perjuangan dimulai Sardi yang dibanggakan oleh masyarakat Kodingareng itu tidak pernah lagi datang untuk memperjuangkan pulau kelahirannya. Janji untuk tidak mundur dalam perlawanan kini hanya tinggal kenangan saja. Dia menghilang tanpa alasan dan tanpa berpamitan dengan warga. Sementara tambang pasir masih tetap beroperasi mengeruk pasir laut.

Setelah Sardi tidak lagi mendampingi masyarakat Kodingareng muncullah babak baru perlawanan mereka, setelah perjumpaan mereka bersama aktivis Walhi. Penduduk pulau kembali menyusun strategi perlawanan untuk mengusir kapal Boskalis yang semakin gencar beroperasi. Dari pertemuan dengan Walhi warga memperoleh banyak pembelajaran. Warga menjadi berani mengadvokasikan kepentingannya,

mengasah keberanian dan menata perbincangan dengan berbagai elemen pemegang otoritas, seperti polisi, wakil rakyat & pemerintah. Dan yang paling menikmati babak baru ini adalah para perempuan yang kian berani menyuarakan kepentingan mereka. Keputusan yang cepat dan berani di lapangan, serta ketegasannya menyusun identitas menjadi bukti utuh dari gerakan perempuan.

Gerakan sosial yang melawan suatu kekuatan modal besar seperti tambang pasir laut, membutuhkan kekuatan yang juga tak kalah besarnya. Untuk memupuk kekuatan itu dilakukan perawatan kerja sama sehari-hari menyangkut hal-hal kecil. Seperti saat ada tamu, mereka beramai-ramai datang, makan bersama, berbincang dan dilanjutkan dengan musyawarah. Mereka juga punya kelompok pengajian, pengajian ini juga salah satu alasan mereka untuk bertemu. Mereka terus berkomunikasi tentang hal-hal baru yang penting apalagi bila berita itu terkait dengan rencana aksi mereka. Pejuang perempuan seperti tidak punya rahasia di antara satu sama lainnya.

Perempuan Kodingareng memiliki budaya yang khas, yaitu sikap perempuan yang keras, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Sikap inilah yang membuat para perempuan Kodingareng tangguh dan komitmen dalam pergerakannya melawan korporasi tambang laut di wilayahnya.

Relasi di dalam rumah perempuan Kodingareng dapat digambarkan dengan posisi perempuan yang cukup kuat, suaranya di dengarkan, pengelolaan perekonomian selalu dalam persetujuannya, meskipun ditemukan ketimpangan dalam pembagian kerja secara gender. Di pulau tersebut laki-laki tidak mengerjakan pekerjaan dapur. Namun disisi lain soal pengasuhan anak lumrah disaksikan seorang laki-laki merawat anak balita. Melalui semua fenomena yang terjadi tersebut, maka perempuan membangun simbolisasi dan ideologi sebagai jaringan pengaman dari kekuatan gerakan.

Kokohnya gerakan perempuan Kodingareng dalam melawan pertambangan pasir laut terlihat pada

saat terjadinya penangkapan nelayan dan pencarian aktivis yang ikut mendampingi di pulau tersebut. Perempuan menjadi garda terdepan yang turun melindungi para aktivis Walhi yang dicari oleh polisi. Pada saat seorang perempuan pulau itu melihat polisi ia langsung berlari dan berteriak memanggil seluruh perempuan pejuang anti tambang untuk turun melindungi mereka. Seketika itu juga para pejuang perempuan yang sementara sibuk di dapur berlarian untuk datang melindungi mereka dari tangkapan polisi. Dengan sekejap mata para perempuan telah berkumpul di salah satu rumah pengaman aktivis dari polisi. Pada situasi itu terdengar suara ibu Sineng yang berteriak dengan lantang,

“Eh kalian, kalau mau bawa ini anak-anak langkahi dulu kami para perempuan di sini. Anak-anak di dalam tidak bersalah. selama kami disini, tidak akan kami biarkan seorang pun menyentuhnya (Sineng, 2021).”

Sementara perempuan lain juga mendukung apa yang diteriakkan oleh Ibu Sineng dalam aksi pencarian aktivis

tersebut. Terlihat jelas karakter tegas dan berani dari perempuan Kodingareng kepada para polisi yang melakukan penjarahan di pulau mereka. Mereka tidak lagi memiliki rasa takut sangat berbeda dari sebelum adanya tambang pasir yang memasuki wilayah perekonomian mereka.

Suara lantang yang ditampakkan oleh perempuan Kodingareng tidak hanya di situ saja tapi ada banyak perlawanan yang dilakukan. Salah satunya adalah demonstrasi yang gencar dilakukan di beberapa titik. Di antaranya ialah aksi besar-besaran yang dilakukan di tengah laut di mana titik tambang pasir laut beroperasi dan aksi ini dilakukan berkali-kali oleh penduduk Kodingareng. Yang lain mereka melakukan demonstrasi di DPRD Provinsi, Kantor Gubernur hingga rumah jabatan Gubernur. Semua hanya dilakukan oleh para perempuan Kodingareng.

Demonstrasi di sekitar kapal Royal Boskalis seringkali mendapatkan tindakan represif dari aparat kepolisian. Dalam aksi mereka di tengah laut

untuk mengusir kapal Boskalis, para perempuan histeris melihat polisi melakukan penangkapan terhadap sejumlah nelayan dan juga para aktivis. Bukan hanya itu perahu yang dikendarai saat hendak kembali ke pulau mereka juga ditabrak oleh dua *speed boat* milik Polair Polda Sulsel yang mengejar mereka (Wawancara Ica, 2022).

Salah satu demonstrasi terbesar juga dilakukan oleh para perempuan Kodingareng di kantor gubernur Sulawesi Selatan. Mereka menuntut agar Gubernur Sulawesi Selatan mencabut perizinan proyek penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan. Mereka menyampaikan dengan tegas bahwa tambang pasir tersebut menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Selain daripada itu juga menimbulkan kerusakan laut yang parah. Aksi ini merupakan sebuah aksi terpanjang yang dilakukan oleh perempuan Kodingareng.

Demonstrasi berlangsung selama dua hari semalam dengan penuh harapan. Mereka berharap

gubernur Nurdin Abdullah mencabut izin tambang yang sedang beroperasi di wilayah mereka. Para perempuan anti tambang terlihat tegas dan kukuh dengan tuntutan mereka. Totalitas perjuangan diperlihatkan para perempuan itu. Untuk sebuah perjuangan mempertahankan hak-haknya ibu-ibu Kodingareng rela membawa anak-anaknya turun melakukan demonstrasi bahkan bayi yang masih sementara menyusui sekalipun.

Demonstrasi yang dilakukan di Kantor Gubernur berlangsung awet, sebab tidak menemukan jawaban apa-apa. Tuntutan mereka seakan dianggap angin lalu. Para demonstran memutuskan untuk menginap di depan Kantor Gubernur, hingga mendapatkan jawaban atas tuntutan mereka. Sayangnya hingga aksi bubar gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sama sekali tidak menampakkan wajahnya di depan para rakyat yang penuh harap atasnya.



Demonstrasi yang dilakukan perempuan kodingareng di depan gubernuran

Berbagai demonstrasi telah dilakukan oleh masyarakat Kodingareng khususnya para perempuan. Mulai dari aksi turun ke laut setiap kali melihat kapal Boskalis melintas, audiens dengan DPR, mendatangi rumah jabatan gubernur hingga bermalam di depan kantor Gubernur Sulsel. Semua itu adalah kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat Kodingareng. Mereka telah berikrar untuk mempertahankan ruang

hidup mereka sampai titik darah penghabisan. Usaha itu pun sedikit memberikan nafas lega kepada penduduk Kodingareng ketika PT. Royal Boskalis menghentikan operasi tambang pasirnya di Copong yang merupakan laut subur bagi para nelayan Kodingareng.

KONGRES PEREMPUAN “MEMBANGUN ORGANISASI, MEMPERKUAT SOLIDARITAS DAN GERAKAN PEREMPUAN KODINGARENG”

Kongres perempuan pertama kali lahir di tahun 1928, tahun yang sama dengan dideklarasikannya sumpah pemuda. Kongres itu merupakan tonggak sejarah bagi gerakan perempuan Indonesia. Hari tersebut lantas dirayakan sebagai Hari Ibu dan hingga kini diakui sebagai lahirnya gerakan perempuan Indonesia. Kongres inilah yang banyak diakui sebagai awal dari gerakan perempuan.

Tercatat dalam buku (Blackburn, 2007) “Kongres Perempuan Pertama”: Sejak tahun 1920-an terlihat kebangkitan nasionalisme yang cepat berhasil menghimpun kekuatan di

tengah masyarakat Indonesia. Di tahun tersebut terjadi lonjakan-lonjakan dalam aktivitas radikal, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan komunis tahun 1926.

Kemudian di tahun 1928 lahirlah Sumpah Pemuda. Di kalangan perempuan lahir pula keinginan untuk menyelenggarakan dan memajukan persatuan di antara organisasi-organisasi perempuan yang mulai berkembang di tahun 1920-an juga. Keinginan itu kemudian terpenuhi dengan terlaksananya kongres perempuan pertama di tahun 1928.

Pada kongres itu dihadiri oleh kalangan perempuan tua maupun muda. Meskipun pada kongres tersebut kebanyakan diwakili oleh perempuan Jawa tetapi mereka mengatasnamakan kongres itu sebagai kongres perempuan Indonesia. Di antara banyak organisasi perempuan yang terbentuk di masa Hindia Belanda hanya perempuan dari Sumatra yang mengirimkan satu perwakilannya. Hal itu disebabkan susahnya perjalanan pada masa itu. Walaupun perempuan di luar pulau Jawa tidak mengikuti kongres tersebut,

mereka tetap memberikan dukungan atas terselenggaranya kongres perempuan nasional yang pertama kali tersebut.

Berbeda dari catatan majalah "Istri" yang ditinjau ulang Blackburn, bahwa kongres perempuan pertama tersebut dipelopori oleh para organisatoris perempuan pada masa itu, kongres perempuan Kodingareng justru dipelopori oleh para perempuan yang sama sekali tidak mengenal dunia aktivisme. Kongres tersebut diselenggarakan atas kesadaran dari pengalaman perempuan selama penambang datang di ruang hidup mereka. Hal ini memperlihatkan terbukanya ruang publik baru bagi perempuan Kodingareng yang tercipta selama proses perlawanan.

Setelah perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat Kodingareng, mereka kini telah menuai hasil. Para penambang telah menghentikan operasinya tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat Kodingareng sebab izin pertambangan tersebut hingga kini belum juga dicabut oleh

pemerintah. Para perempuan masih menaruh rasa curiga bahwa sewaktu-waktu para penambang bisa saja kembali karena mereka masih mengantongi izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan di titik yang sama.

Berdasarkan kecurigaan yang masih dirasakan oleh perempuan Kodingareng, mereka akhirnya bersepakat membentuk sebuah organisasi Rakyat (OR). Organisasi ini diharapkan untuk memperkuat solidaritas dan gerakan perempuan Kodingareng. Melalui organisasi itu juga ritme gerakan mereka bisa terjaga. Selain daripada itu kongres perempuan ini juga bertujuan untuk memperbaiki kembali hubungan sosial yang sempat tegang akibat adanya tekanan-tekanan dari korporat tambang pasir laut itu. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh ibu Rosina:

“Kami menyadari kerapuhan gerakan kami, maka dari itu kami memutuskan untuk membentuk organisasi rakyat yang bisa menampung aspirasi para perempuan Kodingareng. Apalagi jika itu terkait dengan gerakan kami melawan

tambang pasir” (Rosina, 2022).

Mereka pun menyepakati nama organisasinya “Perempuan Pedjuang Kodingareng” dan menggelar kongres yang berlangsung selama dua hari di pulau Kodingareng, 8 hingga 9 maret 2022. Mereka mengangkat tema “Membangun Organisasi, Memperkuat Solidaritas, dan Gerakan Perempuan Pulau Kodingareng”.

Terlihat jelas semangat para perempuan Kodingareng yang hadir dalam kongres tersebut. Mereka begitu antusias untuk menghadiri kongres pertama yang dibuat oleh para perempuan Kodingareng yang juga didampingi oleh para aktivis Walhi dalam penyelenggaraannya. Organisasi ini adalah salah satu penguat gerakan perempuan Kodingareng sebab tanpa organisasi, mereka akan dengan mudah dipecah belah oleh orang-orang yang memiliki kepentingan.

Harapan dari kongres perempuan Kodingareng ini adalah bagaimana agar perempuan semakin bersatu dalam hal melawan tambang pasir yang bisa kembali kapan saja

dengan izin yang masih mereka kantongi. Mereka sangat butuh untuk menyatu, apalagi mereka masih punya tujuan yang lebih besar, yaitu advokasi terkait kebijakan RZWP3K yang menempatkan titik lokasi tambang yang sering kali bertepatan di wilayah tangkap para nelayan. Mereka juga sedang menyusun gugatan untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan atas kerugian yang telah mereka ciptakan untuk para penduduk Kodingareng (Wawancara Sarinah, 2022).



Kongres Perempuan Pedjoang

Kodingareng

Dalam kongres ini diputuskanlah Ibu Aisyah menjadi Ketua Pedjoang Perempuan Kodingareng dan Ibu Rosina menjadi sekretarisnya. Kini para perempuan Kodingareng telah membentuk sebuah budaya organisasi. Budaya organisasi, menurut Sulaksono (2015), mengacu kepada sekumpulan keyakinan bersama, sikap dan tata hubungan serta asumsi-asumsi yang secara eksplisit atau implisit diterima dan digunakan oleh keseluruhan anggota organisasi untuk menghadapi lingkungan luar dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Strategi yang dijalankan oleh perempuan Kodingareng bermula dari hal-hal yang paling sederhana. Mereka mengusir perusahaan dengan cara menghentikan operasi PT Royal Boskalis menggali tambang pasir besi di wilayah tangkap ikan para nelayan. Sasaran mereka tidak diawali dari kebijakan ataupun regulasi. Dari strategi sederhana tersebut mereka kemudian menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan protes pada penambang tapi mereka juga sudah

harus memobilisasi massa ke pemerintah provinsi.

Mereka kemudian melebarkan agenda perlawanan sambil belajar bagaimana strategi memperluas jaringan, negosiasi, dan tawar-menawar. Tidak berselang lama perempuan kemudian mampu menyusun strategi gerakan. Walaupun strategi yang digunakan masih tradisional seperti menggunakan fisik dan bahasa kasar sebagai senjata perlawanan, tetapi telah mengguncangkan kekuasaan. Lahirnya kongres ini juga merupakan strategi gerakan yang jitu untuk tetap merawat ritme gerakan. Dengan kongres mereka bisa membangun organisasi serta memperkuat solidaritas dan gerakan perempuan di pulau Kodingareng.

PENUTUP

Gerakan perempuan Kodingareng dalam melawan tambang pasir adalah gerakan yang telah melahirkan identitas baru pada perempuan lokal. Mereka telah melakukan sebuah gerakan sosial, mereka menciptakan sebuah gerakan untuk mengubah nasib mereka yang pada awalnya tidak memiliki kesadaran

kritis atas hak-hak mereka sebagai warga Negara. Gerakan baru, pengalaman baru telah tercipta di kelompok mereka. Dari berbagai pengalaman pahit yang dialami selama berjuang melawan tambang pasir laut, telah mengubah cara berpikir mereka menjadi kritis dalam merespons berbagai hal. Termasuk kritis dalam merespons kebijakan yang tidak berpihak kepada ruang hidup mereka sebagai warga Negara.

Perempuan Kodingareng telah melahirkan sebuah gerakan feminisme berbasis lokal. Gerakan ini adalah agenda untuk melawan sebuah sistem feodalisme yang tidak adil dan jelas menindas mereka. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa gerakan feminisme kini tidak hanya ditampakkan oleh para pejuang feminisme yang berasal dari kelompok elit, kelas menengah, terpelajar, dan berpendidikan barat tapi juga mampu ditampakkan oleh para perempuan yang sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan sekalipun. Mereka belajar dari sebuah pengalaman yang menjadikan mereka kritis dan

mampu melahirkan strategi-strategi jitu untuk melakukan sebuah perlawanan.

Penderitaan bersama yang dialami kemudian merajut bangunan solidaritas sesama perempuan. Mereka lalu membentuk pengetahuan baru tentang cara menyasati dan menghadapi sistem dan cara kerja ruang publik. Pengetahuan yang terbangun dari kerja sama perempuan dan laki-laki. Dampaknya kemudian ialah terdapat sebuah perubahan pranata sosial baik di dalam rumah maupun di lingkup komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, S. (2017). Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 1(2), 106–119. <https://doi.org/10.29408/fhs.v1i2.587>
- Anggariani, D., Sahar, S., & Sayful, M. (2021). Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai. *SIGn Journal of Social Science*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>
- Barker, C. (2016). *culture Studies, Teori & Praktik* (H. Purwanto (ed.); kesepuluh). Kreasi Wacana.
- Blackburn, S. (2007). *kongres perempuan pertama* (1st ed.). yayasan pustaka obor Indonesia & kitlv-jakarta.
- Endraswara, S. (2006). *metode penelitian kebudayaan*. gajah mada university press.
- Kartika, T. (2014). *Perempuan Lokal vs Tambang Pasir Besi Global* (1st ed.). yayasan pustaka obor Indonesia.
- Kartika, T. (2018). *ragam identitas perempuan bukan bayang-bayang: menguatkan konstruksi nasionalisme*. yayasan pustaka obor nasional.
- Muhadjir Darwin. (2004). sejarah gerakan perempuan dari masa ke masa. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(gender), 1.
- pelindo. (2019). *Profil MNP*. Pelindo.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharko. (2011). *Gerakan Sosial* (A. Lie (ed.); 4th ed.). Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.
- Sukmana, O. (2016). *gerakan sosial: Konsep dan Teori*. intrans publishing.
- Sulaksono, H. (2015). *budaya organisasi dan kinerja*. deepublish.
- You, Y. (2021). *Gender, feminisme dan fungsionalisme struktural: model laki-laki baru masyarakat hubula suku dani*. nusamedia.
- Zuleha Ernas, M. H. T. & W. S. P. (2018). "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Keckeruhan Perairan Teluk Banten Serang." *Jurnal Segera*, 14(tambang pasir), 36.

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.